e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 10 No 10 Tahun 2023 Hal. : 4676-4684

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI KELURAHAN PEKAYON JAYA KECAMATAN BEKASI SELATAN

Lucky Ortega

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Program Kampung Iklim (Proklim) Di Kelurahan Pekayon Jaya Kota Bekasi. Studi ini bertujuan mengekplorasi mengenai pelaksanaan program tersebut menggunakan konsep PartisipasiiMasyarakat menuruttCohen dan Uphoff, yang mana sebuah program dapat dilihat efektivitasnya ketika partisipasi dari setiap Stakeholder ada. Cohen dan Uphoff memberikannrumusan partisipasi masyarakattyang lebih aplikatiffsebagai berikut, Participation in decision making (partisipasi dalammpengambilan keputusan), Participation in implementation (partisipasi dalam pelaksanaan), Participation in benefit (partisipasi dalam kemanfaatan), Participation in evaluation (partisipasi dalam evaluasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatiffdengan pendekatan deskriptiffyang melibatkan beberapa narasumber yang dianggap cocok dalam penelitian ini. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dimensi partisipasi dalam pengambilan keputusan, masyarakat dilibatkan tapi secara keterwakilan di setiap RT, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ProKlim tinggi karena masyarakat sudah lama tertarik dengan isu lingkungan, partisipasi dalam kemanfaatan tinggi karena masyarakat merasakan manfaat dari kegiatan ProKlim, partisipasi dalam evaluasi disini masyarakat dilibatkan secara tidak langsung untuk mengevaluasi kegiatan ProKlim.

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, ProKlim.

PENDAHULUAN

Setiap manusia pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan, keduanya saling bergantungan dan mempengaruhi. Isu Lingkungan yang dihadapi masyarakat dunia pada saat ini adalah perubahan iklim. Tidak dapat

*Correspondence Address : siraitortega@gmail.com
DOI : 10.31604/jips.v10i10.2023. 4676-4684
© 2023UM-Tapsel Press

terelakan, perubahan iklim ini bisa menjadi bencana yang mengancam seluruh manusia di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia.

Pemerintah sebenarnya sejak 75 tahun yang lalu telah mengemukakan bahwa, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 H ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Di samping amanat tersebut, meningkatnya pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim seperti mencairnya es di kutub dan menipisnya lapisan ozon semakin memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Hal inilah yang mendorong Pemerintah melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pegelolaan Lingkungan Hidup.

Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat diintegrasikan melalui kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dipimpin oleh masyarakat ditingkat lokal dengan memperhatikan faktor risiko iklim dan dampak iklim. Perubahan iklim sangat mungkin terjadi. Segala upaya yang dilakukan oleh masyarakat harus diinventarisasi dan dicatat dengan baik agar kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dan penguatan kapasitas adaptasi dapat diukur di tingkat nasional. Pendataan aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat dilaksanakan melalui pendekatan yang bersifat bottom-up, yaitu dengan mendorong berbagai pihak mengumpulkan informasi mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat dan dapat memberikan manfaat nyata terhadap upaya penanganan perubahan iklim. Pendataan dan pengukuran manfaat tersebut dibatasi pada luasan tertentu dengan menggunakan terminologi "Kampung Iklim" yang menjadi satu program seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 bahwa, Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut Proklim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong masyarakat untuk melakukan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilaksanakan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Keterlibatan atau partisipasi masyarakat ini mempunyai peran penting selaras dengan prinsip-prinsip dasar good governance, yang dapat diartikan masyarakat memliki peran penting dalam penyelenggaraan setiap program pemerintah. ProKlim sendiri tidak akan terlaksana dengan baik, jika partisipasi masyarakatnya sendiri kurang ataupun tidak antusias. Pada tahun 2011 ProKlim pertama kali diluncurkan dan telah berkembang serta mendapatkan tanggapan positif dari berbagai pihak. Semenjak program ini di luncurkan sampai 2017 sudah mencatat sebanyak 1.375 lokasi yang telah tersebar seluruh wilayah Indonesia.

Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Ibukota Jakarta yang telah menjalankan ProKlim. Tentunya sebagai penyangga ibukota, Kota Bekasi menjadi kota yang amat

sibuk dengan berbagai macam aktivitas masyarakatnya yang tanpa mereka sadari aktivitas yang dilakukannya dapat mempengaruhi kondisi lingkungan. Aktivitas yang dilakukan masyarakat sebagian besar menjadi sumbangsih penyebab timbulnya GRK di Kota Bekasi antara lain peningkatan jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan jumlah industri, alih fungsi lahan, pemakaian *Air Conditioner* (AC) yang non BPO, pemakaian batu bara, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi berperanserta untuk mendukung agenda perubahan iklim di Indonesia termasuk Kota Bekasi dengan terus berupaya untuk melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dengan mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 660.1/1440.SE/DinasLH tentang Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Bekasi. Hal ini sejalan dengan tujuan khusus ProKlim yang dinyatakan dalam pedoman umum pada Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi, sejak tahun 2018 sudah 4 (empat) wilayah di Kota Bekasi yang masuk dalam ProKlim dan sudah terdaftar di SRN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Rw 13 Kelurahan Surya Mandala, Kecamatan Bekasi Selatan; Rw 15 Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Rw 20 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur dan Rw 11 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Menurut informasi yang penulis peroleh pada saat pra penelitian pada bidang penilaian bahwa Rw 11 di Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah yang diusulkan sebagai peserta ProKlim oleh DLH Kota Bekasi. Walaupun ProKlim sudah dilaksanakan oleh masyarakat di Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan, namun sampai saat ini hasilnya belum optimal antara lain karena tidak semua masyarakat paham dengan kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi emisi GRK serta penguatan kapasitas masyarakat terhadap lingkungan sebagai dampak perubahan iklim. Belum tersosialisasikannya pengenalan konsep adaptasi dan mitigasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan mengenai perubahan iklim dan dampaknya. Masalah lain di Kelurahan Pekayon Jaya yaitu sikap atau kewaspadaan sebagian masyarakat untuk mengurangi dan memperkecil dampak dari bencana yang dapat mempengaruhi lingkungan seperti sampah yang terkadang berserakan di jalanan yang bisa menyebabkan saluran drainase terhambat ketika hujan turun sehingga menimbulkan genangan air yang cukup mengganggu pengguna jalan.

Menurut salah satu pegiat lingkungan di Kelurahan Pekayon Jaya bahwa tidak semua kegiatan ProKlim yang telah direncanakan pada saat perencanaan yang diikuti oleh pegiat lingkungan dan setiap ketua RT bisa diterima masyarakat. Hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi sebagian masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ProKlim, yang seharusnya diawali dengan konsisten kesadaran masyarakat terhadap kegiatan ProKlim yang dilakukan dari rumah masing-masing. Misalnya, dalam melakukan kegiatan melestarikan lingkungan atau ingin memiliki lingkungan yang bersih dan asri di Kelurahan Pekayon Jaya, harus dimulai atas dasar kesadaran sendiri atau partisipasi masyarakat dengan tidak membuang sampah sembarangan di lingkungannya. Belum adanya pihak pelaksana evaluasi di Kelurahan Pekayon Jaya menjadi salah satu alasan masih adanya beberapa kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dianggap

tidak perlu dilakukan, hal ini diketahui ketika penulis menemui salah satu pegiat lingkungan di RW 11 Kelurahan Pekayon Jaya.

Istilah partisipasi masyarakat sering dikaitkan dengan pembangunan yang dalam kenyataannya pembangunan itu bukan untuk siapa-siapa akan tetapi semua itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu program-program pembangunan apapun seharusnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebab masyarakatlah yang mengetahui sepenuhnya mengenai permasalahan yang dihadapinya. Banyak bentuk partisipasi masyarakat dilihat dari keadaan lingkungan sosial ekonomi termasuk berbagai kejadian bencana alam, banjir, dan lain sebagainya yang secara spontan dapat mendorong memberikan partisipasinya untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak bencana tersebut. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menagani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Untuk lebih memahami konstruksi tingkatan partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Partispasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah masyarakat berpartisipasi dalam proses pengembangan/pengambilan keputusan dengan menyampaikan pendapat/saran.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan ini dapat berupa kontribusi. Menurut Mubyarto (1988:37), kontribusi tersebut tercermin dari kesediaan masyarakat untuk mendukung pada setiap tahapan pelaksanaan pembangunan sesuai kemampuan masing-masing orang tanpa harsu mengorbankan diri. Pada dasarnya ada tiga kontribusi yang diberikan yaitu kontribusi tenaga, kontribusi uang dan kontribusi bahan (material).

3. Partisipasi dalam kemanfaa tan

Partisipasi dalam kemanfaatan merupakan partisipasi dapat membawa manfaat yang lebih besar/positif bagi pemerintah dan masyarakat. Dengan partisipasi tersebut maka masyarakat harus menerima manfaat positif yang timbul dari kegiatan pembangunan tersebut.

4. Partisipasi dalam evaluasi

Keikutsertaan dalam evaluasi merupakan peran serta masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan hasil perencanaan. Menurut Suwignjo (1985: 110), ikut serta dalam evaluasi bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh pekerjaan yang dilakukan berlangsung sesuai rencana yang telah ditentukan..

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola) dan disebut sebagai metode interpretive karena datahasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2017:7).

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti adalah di RW 11 Kelurahan

Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan. Penelitian dilakukan selama beberapa bulan dengan narasumber Sub Koordinator Inventarisasi RPPLH, KLHS dan Pemeliharaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Ketua ProKlim RW 11 dan Masyarakat RW 11 Kelurahan Pekayon Jaya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisa bagaimana partisipasi masyarakat dalam program yang telah dibuat oleh Pemerintah tersebut, penulis disini menggunakan teori partisipasi Cohen dan Uphoff (1977:99) yang terbagi menjadi 4 dimensi bentuk partisipasi yaitu: (1) *Participation in decision making* (Partisipasi dalam pengambilan keputusan); (2) *Participation in implementation* (Partisipasi dalam pelaksanaan); (3) *Participation in benefit* (Partisipasi dalam kemanfaatan); (4) *Participation in evaluation* (Partisipasi dalam evaluasi). Dari keempat dimensi tersebut, peneliti bisa melihat sejauh mana partisipasi masyarakat sebagai pelaksana Program Kampung Iklim dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Kelurahan Pekayon Jaya.

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, jika mengacu pada indikator partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pada kegiatan Program Kampung Iklim, keterlibatan masyarakat jelas adanya pada indikator ini. Inisiasi merupakan dasar dari sebuah kegiatan dapat berjalan, dapat dilihat masyarakat sudah peduli terhadap lingkungan sejak lama. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70 pada ayat (1), masyarakat di Kelurahan Pekayon Jaya sudah menjalankan perannya. Pembentukan Kepengurusan ProKlim di setiap RT membantu menampung gagasan dan pemikiran dan secara tidak langsung andil masyarakat dalam partisipasi dalam pengambilan keputusan sudah berjalan, walaupun masih ditemui masyarakat yang belum sepenuhnya menuangkan gagasan atau pemikirannya terhadap kegiatan ProKlim ini.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pada indikator partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pada kegiatan Program Kampung Iklim, keterlibatan masyarakat jelas adanya dalam pelaksanaan Kampung Iklim.

Gambar 1.1 Penghargaan Kategori Lestari Kelurahan Pekayon Jaya
Sumber: Portal berita Bekasi Satu

Penghargaan Kategori Lestari merupakan buah hasil yang di dapatkan dari pelaksanaan kegiatan ProKlim oleh masyarakat RW 11. Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim pada poin c menyebutkan mendorong penyebarluasan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah berhasil dilaksanakan pada lokasi tertentu untuk dapat diterapkan di daerah lain sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat

setempat. Artinya masyarakat RW 11 mengikuti dan serius dalam menjalankan program sesuai dengan peraturan yang mengatur terkait kegiatan ProKlim. Selain itu faktor pendukung lainnya ada di ketersediaan waktu masyarakat di RW 11 Pekayon Jaya untuk melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi, karena mayoritas masyarakat yang sudah pensiun bekerja atau usia yang lanjut (Lansia). Walaupun masih ada ditemui beberapa masyarakat tidak ikut berpartisipasi, namun keberhasilan meraih penghargaan membuktikan mayoritas masyarakat ikut berpartisipasi.

3. Partisipasi dalam kemanfaatan

Berdasarkan hasil penelitian yang ada di lapangan, indikator partisipasi masyarakat dalam kemanfaatan sangat terlihat. Mengacu pada Permen LH nomor 19 tahun 2012, disitu dijelaskan manfaat dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim meliputi 3 komponen yaitu manfaat ekonomi, manfaat lingkungan dan pengurangan dampak kejadian iklim ekstrim. Dari ketiga komponen tersebut dapat dikatakan ketiga komponen tersebut berjalan dengan baik. Dari aspek manfaat ekonomi mereka bisa memanfaatkan setiap kegiatan seperti menanam sayur dan buah.

Gambar 1.2 Tanaman Sayur Masyarakat
Sumber: Dokumentasi ProKlim RW 11 tahun 2019-2020

Hasil dari sayuran tersebut bisa dikonsumsi sendiri ataupun dijual kembali. Aspek manfaat lingkungan, selama penulis berada di lapangan, lingkungan RW 11 Kelurahan Pekayon Jaya terlihat asri karena banyaknya pohon dan tanaman hasil dari kegiatan ProKlim tersebut.

Gambar 1.3 Kondisi Lingkungan RW11 Pekayon Jaya
Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti

Dari aspek pengurangan dampak perubahan iklim, setelah penulis menelusuri setiap portal berita, penulis menemukan dalam Tribunnews.com terakhir kali RW 11 mengalami banjir akibat dampak perubahan iklim pada tanggal 1 Januari 2020 selama 2 tahun mereka berbenah sampai sejauh ini mereka dapat merasakan pengurangan dampak perubahan iklim. Walaupun masih ada terdapat beberapa masyarakat yang belum berpartisipasi dalam kemanfaatan ini, penulis dapat menyimpulkan dalam indikator partisipasi dalam kemanfaatan bisa dikatakan baik.

4. Partisipasi dalam evaluasi

Berdasarkan hasil penelitian, pada indikator partisipasi masyarakat dalam evaluasi masyarakat ikut mengambil bagian. Walaupun tidak terlibat secara langsung ke dalam proses evaluasi tersebut, namun masyarakat bisa langsung memberi masukan dan saran melalui pengurus maupun Dinas LH. Menurut peneliti keterlibatan masyarakat RW 11 di Kelurahan

Pekayon Jaya dalam proses evaluasi terlihat, jika merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dinyatakan peran masyarakat dalam Pasal 70 pada ayat (1) pada poin d menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, dasar itu yang bisa dapat penulis simpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi berjalan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam pelaksa naan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan, dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada indikator partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan penulis menyimpulkan bahwa, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terlihat jelas dengan inisiasi masyarakat lah yang menjadi dasar dan kepengurusan yang tersebar di setiap RT yang mewakilkan setiap masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Pada indikator ini partisipasi dalam pelaksanaan penulis menyimpulkan bahwa, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kampung iklim tinggi terlihat dari beberapa pencapaian RW 11 Kelurahan Pekayon Jaya dalam kegiatan ProKlim dengan meraih beberapa penghargaan yang diraih, yaitu Kategori Utama dan Lestari.

3. Partisipasi dalam kemanfaatan

Pada indikator partisipasi dalam kemanfaatan penulis dapat menyimpulkan bahwa, indikator partisipasi masyarakat dalam kemanfaatan tinggi. Masyarakat mampu memanfaatkan kegiatan adaptasi dan mitigasi, jika dilihat dari komponen manfaat ekonomi, lingkungan dan pengurangan dampak perubahan iklim.

4. Partisipasi dalam evaluasi

Pada indikator partisipasi dalam evaluasi penulis menyimpulkan bahwa, pada indikator partisipasi masyarakat dalam evaluasi cukup tinggi, karena masyarakat tidak ragu memberi masukan secara langsung kepada Pengurus ProKlim ataupun Dinas LH. Walaupun dalam rapat kegiatan evaluasi tidak dilibatkan secara langsung.

Saran

Saran dari peneliti terkait Partisipasi
Masyarakat dalam pelaksanaan
Program kampung iklim:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, ada kalanya menyiapkan forum yang lebih besar untuk memberikan hak untuk memberi keputusan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan, perlu adanya pendekatan yang mendalam seperti mengadakan perlombaan dan memberikan *reward* terhadap masyarakat agar menimbulkan ketertarikan terhadap yang belum ikut berpartisipasi agar kedepannya setiap pelaksanaan kegiatan ProKlim optimal.
3. Partisipasi dalam kemanfaatan, perlu adanya upaya meningkatkan partisipasi masyarakat agar lebih optimal dalam

pemanfaatan kegiatan ProKlim yang dilaksanakan.

4. Partisipasi dalam evaluasi, perlu dibuat ruang terhadap masyarakat yang tidak masuk dalam kepengurusan dalam proses kegiatan evaluasi agar tercapainya dimensi partisipasi dalam evaluasi yang efektif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelembutan sehingga dapat meneliti data yang diinginkan. Jangan lupa pula kepada orang tua peneliti yang membantu peneliti dalam penulisan artikel ini dan juga rekan-rekan, saudara serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis kutip satu per satu karena telah memberikan data, izinkan peneliti menulis artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto 2006. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas*. Universitas Indonesia: Fisip UI Press.

Aidila, Azika Putri. 2019. *Pelaksanaan Program Kampung Iklim Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Astuti, D Siti Irene. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis dan Empirik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dokumen kegiatan ProKlim RW 11 di Kelurahan Pekayon Jaya

Dokumen tentang penyelenggaraan Program Kampung Iklim di Kota Bekasi

Faedlulloh, Dodi & Irawan, Bambang & Prasetyanti, R. 2018. *Program Unggulan Kampung Iklim (Proklim) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik.

Ghina, N.Y & Zunariyah, Siti. 2017. *Kampung Iklim: Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.* Jurnal Sosiologi.

Mulyadi, Mohammad. 2019. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Nadi Pustaka.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Iklim, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1068).

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 76 Seri D).

Puspito, Ahmad Ilham. 2016. *Implementasi Program Kampung Iklim Di Kelurahan Plalangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2016*. Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Putri, Ika Muliani. 2019. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim Di Dusun Soka Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun 2019*. Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Rekavianti, Elsya. 2019. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) Di Kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung; Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Didera Hujan Belasan Jam, Perumahan Pondok Pekayon Indah Bekasi Kebanjiran - TribunNews.com

http://repository.upi.edu/32646/4/S_GEO_0906754_Chapter1.pdf

https://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat